

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh

Zachari Abdallah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Email: ariey_cosmoride@yahoo.com

Cyntia Carolina²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of performance-based budgeting to the public Accountability of government agencies at the Department of Public Works cultivated fields river town full clan . Sampling technique using sample becomes saturated criteria are all employees of the public works in the field of coaching clan as well as all the activities in performance-based budgeting . Number of questionnaires distributed as many as 32 pieces and all can be processed using simple linear regression analysis , the determinant coefficient , and t test and using SPSS 22.0. The results showed that the application of performance-based budgeting and significant positive effect on public Accountability in government agencies.

Keywords: Public Accountability, performance based budgeting, public works clan cultivated fields.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik instansi pemerintah pada Dinas pekerjaan umum bidang bina marga kota sungai penuh. Teknik penentuan sampel menggunakan saturated sample yang menjadi kriterianya adalah seluruh pegawai dinas pekerjaan umum di bidang bina marga serta semua yang melakukan aktivitas dalam anggaran berbasis kinerja. Jumlah kuisisioner yang disebarkan sebanyak 32 buah dan semua dapat diolah menggunakan analisis persamaan regresi linear sederhana, koefisien determinan, dan uji t dan dengan program SPSS 22,0. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Akuntabilitas publik, anggaran berbasis kinerja, dinas pekerjaan umum bidang bina marga.

I. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsi dari agen atau pemerintah daerah (Yuhertiana; 2003) serta merupakan proses akuntabilitas public (Bastian;2006). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Article Tract:

Submission : Oktober 26, 2017

Final Review : December 28, 2017

Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow et al.,1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim et al.;2007). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Secara ringkas menurut Abdul Halim (2007:20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Anggaran berbasis kinerja (Performance based budgeting) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Menurut (Halim 2007:177) “ Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja ” (Bastian 2006:171) “Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi”.

Keterkaitan antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas publik terlihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:105) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat daripengeluaran dan hasil tersebut.

Dalam pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Publik, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang terukur melalui prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah bahwa harus transparansi, akuntabilitas dan *value for money*.

Mardiasmo (2004: 105) bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. transparansi juga memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak atas proses anggaran karena menyangkut tentang kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang berarti proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pada DPRD. Sedangkan *Value for money* berarti diterapkannya proses penganggaran yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti juga tercapainya sasaran pemerintah daerah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetya Bahri (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan telaah teoritis, hasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran yang telah disusun, maka digunakan pengujian hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis yang ditetapkan adalah:

$H_0 : r = 0$, di duga tidak terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Sungai Penuh.

$H_a : r \neq 0$, di duga terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja yang signifikan terhadap akuntabilitas publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Sungai Penuh.

II. METODE PENELITIAN

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan menggunakan kuisioner.

Di dalam penelitian ada beberapa jenis data yang digunakan, antaranya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh.

Menurut Sugiono (2006; 56), sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel, sampel dalam penelitian ini di ambil dari semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel atau metode sampel jenuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1996:76) yang menyatakan bahwa apabila objeknya kurang dari 100 maka populasi tersebut langsung dijadikan sampel, mengacu pada pendapat diatas maka penelitian ini menggunakan semua populasi, hal ini disebabkan jumlah pegawai bidang bina marga dinas pekerjaan umum Kota Sungai Penuh kurang dari 100 orang yakni 32 orang.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Untuk metode kuantitatif digunakan alat analisis berupa skala likert yang dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana.

$$Y = a + bx \dots\dots\dots$$

Dimana:

- Y : Variabel dependen (nilai yang di prediksi)
- X : Variabel independen
- a : Konstanta (nilai Y apabila X=0)
- b : Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji-t. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait.

III. HASIL PENELITIAN

Tabel 1: Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Model	Unstandardized		Standardized coefficient		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	16,552	8,564		1,937	,062
Anggaran berbasis kinerja	1,020	,139	,801	7,328	,000

Dari tabel diatas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 16,552 + 1,020 (X)$$

Konstanta sebesar 16,552 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel anggaran berbasis kinerja (x) maka anggaran berbasis kinerja sebesar 16,552.

Tabel 2 : Koefisien determinan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dinas

Model	Adjusted R Square		Std. Error of the
1	,801a	,642	4,766

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa nilai R square sebesar 0,642, dengan demikian maka besarnya pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar 64,2% .variasi akuntabilitas publik dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen akuntabilitas publik sedangkan sisanya (100% - 64,2% = 35,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pada pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggung jawaban organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} yang didapat sebesar 7, sedangkan t_{tabel} $df = 30$ adalah 2,042 artinya $t_{hitung} \geq t_{tabel}$. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa H_a ditolak H_o diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Sungai Penuh.

IV. KESIMPULAN

1. Mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Di Kota Sungai Penuh. Dari perhitungan $Y = 16,552 + 1,020 (X)$ dapat diketahui pengaruhnya sangat signifikan.
2. Mengetahui besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Di Kota Sungai Penuh. Dari determinasi sebesar 64%, sedangkan 36% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti pada pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggung jawaban organisasi.

Saran

1. Dalam melakukan pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Di Kota Sungai Penuh sebaiknya harus meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya; penerapan efisiensi (savings) dan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja agar anggaran pendapatan terealisasi dengan baik, maka penyusunan anggaran pendapatan dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 4. Erlanga: Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*.
- Ety, Rochaety. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2005. *Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, CV., Alfabeta, Bandung.
- lpse.sungaipenuhkota.go.id
- www.sungaipenuhkota.go.id www.google.com.